



RENCANA KERJA (RENJA)

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

2024

Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

Menengah daerah (RPJMD) dan Resntra Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan Pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana kerja tahunan merupakan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra OPD maupun, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menyusun dokumen Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

- b. Sekretaris DPRD membawahi
 - 1). Bagian Umum dan Keuangan
 - 2). Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan
 - 3). Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan

1. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- (2). mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- (3). mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- (4). memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- (5). mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- (6). menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- (7). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- (8). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- (9). menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- (10). menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (11). mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (12). memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- (13). memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- (14). menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (15). melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- (16). mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (17). memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- (18). mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (19). mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

- (20). mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- (21). menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- (22). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

c. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

1). **Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas

- (1). melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- (2). melaksanakan kearsipan;
- (3). menyusun administrasi kepegawaian;
- (4). menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (5). menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- (6). menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- (7). menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

2. **Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan**

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- (2). memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- (3). memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- (4). memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- (5). mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- (6). memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;

- (7). menyusun risalah rapat;
- (8). mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- (9). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- (10). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- (11). menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- (12). menyelenggarakan hubungan masyarakat
- (13). menyelenggarakan publikasi; dan
- (14). merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- (15). menyelenggarakan keprotokolan
- (16). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

3. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

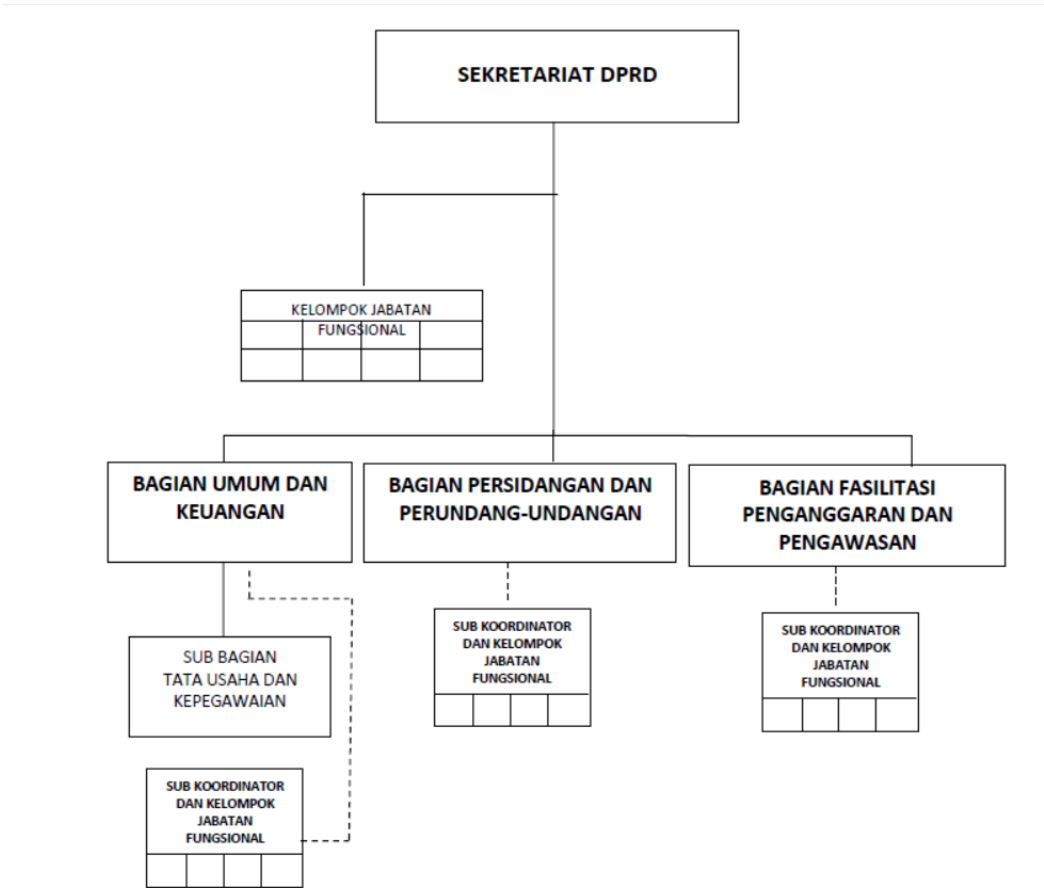
- (1). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- (2). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- (3). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- (5). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- (6). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- (7). merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- (8). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- (9). memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- (10). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (11). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

- (12). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- (13). memfasilitasi reses DPRD;
- (14). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- (15). merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- (16). memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- (17). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1. Tugas Pokok
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tanggal 31 Maret 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan.
30. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan tiga tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah:

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD, serta penjelasan mengenai Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan sejauh mana evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Rentra OPD, Analisa kinerja pelayanan OPD serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rencana awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menggambarkan penelaahan terhadap kebijaksanaan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan

Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya: Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur; Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada; Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang cukup. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya; Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan; Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas

tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

Secara rinci evaluasi pelaksanaan renja 2025 dan capaian renstra dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiat an s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n- 1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
				Target Perangk at Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisas i Perangk at Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		sesuai target akhir periode 2026 (bukan target 2026)	tdk perlu diisi	tdk perlu diisi	tdk perlu diisi		sesuai DPA 2024		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana	95%				#DIV/0!	95%	95%	20%

DPRD									
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80%		12	12	#DIV/0!	80%	80%	20%
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>		<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100%</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>17%</i>
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>17%</i>
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan an Naskah Akademik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>	<i>12 Dokumen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>17%</i>
<i>Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>
...									
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pengesahan APBD Tepat Waktu	95%		29	29	#DIV/0!	95%	95%	20%
<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>

Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	95%		103	103	#DIV/0!	90%	90%	20%
<i>Orientasi DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>
<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>4 Dokumen</i>		16	16	<i>100%</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>25%</i>
<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>8 Orang</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>150 Orang</i>	<i>12 Orang</i>	<i>8%</i>
<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>7 Orang</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>84 Orang</i>	<i>7 Orang</i>	<i>8%</i>
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>12 Dokumen</i>		87	87	<i>100%</i>	<i>50 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>8%</i>
<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>
<i>Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>12 Dokumen</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>8%</i>
...									
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100%		3	3	#DIV/0!	100%	100%	0%

<i>Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	<i>50 Dokumen</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Pelaksanaan Reses</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	<i>3 Dokumen</i>		3	3	<i>100%</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0%</i>
...									
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%		-	-	0	100%	100%	20%
<i>Penyusunan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>		-	-	<i>0%</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>
...									
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100%		208	208	1	100%	100%	9%
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>12 Dokumen</i>		208	208	<i>100%</i>	<i>64 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>9%</i>
...									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	95%				#DIV/0!	95%	95%	20%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%		2	2	1	100%	100%	20%
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>
...									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85%		1.175	1.167	4,949367089	85%	85%	8%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Paket</i>		<i>977</i>	<i>977</i>	<i>100%</i>	<i>12 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>8%</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Paket</i>		<i>158</i>	<i>150</i>	<i>95%</i>	<i>12 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>8%</i>
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>12 Paket</i>		<i>16</i>	<i>16</i>	<i>100%</i>	<i>12 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>8%</i>
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>12 Dokumen</i>		<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100%</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>8%</i>
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan</i>	<i>12 Laporan</i>		<i>12</i>	<i>12</i>	<i>100%</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>8%</i>

	Tamu								
...									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	90%		20	20	#DIV/0!	90%	90%	8%
<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>2 unit</i>		-	-	<i>#DIV/0!</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>168 unit</i>		20	20	100%	168 unit	14 unit	8%
...									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	87%		30	24	2	87%	87%	20%
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>6 Laporan</i>		6	-	0%	6 Laporan	1 Laporan	20%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>		12	12	100%	12 Laporan	1 Laporan	8%

<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>		12	12	100%	<i>12 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	8%
...									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	87%		211	207	3,789473684	87%	87%	20%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>24 Unit</i>		19	19	100%	<i>24 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	20%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>24 Unit</i>		19	15	79%	<i>24 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	20%
<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>5 Unit</i>		5	5	100%	<i>5 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	20%

<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>168 Unit</i>		<i>168</i>	<i>168</i>	<i>100%</i>	<i>168 Unit</i>	<i>14 Unit</i>	<i>20%</i>
...									
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100%		250	228	2,56	100%	100%	20%
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	<i>50 Orang/ bulan</i>		<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100%</i>	<i>50 Orang/ bulan</i>	<i>50 Orang/ bulan</i>	<i>20%</i>
<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	<i>150 Paket</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100%</i>	<i>150 Paket</i>	<i>150 Paket</i>	<i>20%</i>
<i>Terlaksananya Medical Check Up DPRD</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	<i>50 Orang</i>		<i>50</i>	<i>28</i>	<i>56%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
...									
Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100%		2	2	#DIV/0!	100%	100%	20%
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>	<i>2 Dokumen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>20%</i>

<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	<i>2 Dokumen</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>20%</i>
--	---	------------------	--	----------	----------	-------------	------------------	------------------	------------

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan
Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2024	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendoro ng/ pengha mbat	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95%	95%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%		
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>		
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>		
...				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>26 orang/bula n</i>	<i>26 orang/bula n</i>		
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
...				
Administrasi Barang Milik	100%	100%		

Daerah pada Perangkat Daerah				
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>		
...				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	85%		
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>12 Paket</i>	<i>12 Paket</i>		
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>12 Paket</i>	<i>12 Paket</i>		
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>12 Paket</i>	<i>12 Paket</i>		
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>		
...				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%		
<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>		
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>168 unit</i>	<i>168 unit</i>		
...				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87%	87%		
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>		

<i>Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>		
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>		
<i>...</i>				
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>87%</i>	<i>87%</i>		
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>24 Unit</i>	<i>24 Unit</i>		
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>24 Unit</i>	<i>24 Unit</i>		
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>5 Unit</i>	<i>5 Unit</i>		
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>168 Unit</i>	<i>168 Unit</i>		
<i>...</i>				
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	<i>50 Orang/bulan</i>	<i>50 Orang/bulan</i>		
<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	<i>150 Paket</i>	<i>150 Paket</i>		

<i>Terlaksananya Medical Check Up DPRD</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>		
<i>...</i>				
Layanan Administrasi DPRD	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>		
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>		
<i>...</i>				
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>95%</i>	<i>95%</i>		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>80%</i>	<i>80%</i>		
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
<i>Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>...</i>				
Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>95%</i>	<i>95%</i>		
<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Pembahasan APBD</i>	<i>28</i>	<i>28</i>		

	<i>Dokumen</i>	<i>Dokumen</i>		
<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
...				
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasi Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
...				
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>		
<i>Orientasi DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4 Dokumen</i>		
<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>150 Orang</i>	<i>150 Orang</i>		
<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>84 Orang</i>	<i>84 Orang</i>		
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>50 Dokumen</i>	<i>50 Dokumen</i>		
<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
<i>Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>		
...				
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		

Masyarakat				
<i>Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>		
<i>Pelaksanaan Reses</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>		
...				
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<i>Penyusunan Kode Etik DPRD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>		
...				
Fasilitasi Tugas DPRD	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>64 Dokumen</i>	<i>64 Dokumen</i>		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan setwan diantara berdasarkan indikator kinerja sasaran yang di tetapkan di dalam renstra yaitu :

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD.

Indikator Sasaran : Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Setwan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKU (Indikator Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026											
	Indikator lainnya (SPM/ IKK Outcome)											
	IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD			83				89,86				
	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi			100%				100%				
	Nilai SAKIP			76.90								

	Indeks Kepuasan Anggota DPRD				78%	80%	82%			80%	82%	
	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi				92%	93%	94%			93%	94%	
	Nilai SAKIP				76,99	77,12	77,55			77,12	77,55	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023S

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan pelayanan pembantuan kepada Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu merumuskan dan merencanakan segala kebutuhan kegiatan DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan membawahi Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Keuangan. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan dan hambatan

antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kerjasama antar staf dan unit kerja.
3. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana dan prasarana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila tidak segera diatasi akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dari setiap program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasuruan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rencana awal RKPD dapat dijelsakan bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan sekwan telah diakomodir dalam Ranwal RKPD. Namun demikian dari aspek besaran anggaran terdapat sedikit peningkatan (tidak signifikan) berdasarkan perkiraan perubahan harga satuan atau inflasi. Secara rinci dijelaskan pada tabel 2.4

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sesuai Renstra 2024-2026					sesuai kebutuhan tahun rencana					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	95%	55.270.181 .905	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	95%	150.125.702. 017	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	90%	95.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	90%	95.000.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	40.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	5.896.664.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	6.149.954.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.999.114.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 / tahun	4.151.760.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	

5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	244.644.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	400.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	400.000.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85%	3.302.550.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85%	1.823.573.200	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.800.000	

8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.950.650.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	479.173.200	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	245.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	245.600.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	265.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	280.000.000	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	715.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	693.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	90%	6.178.532.821	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	90%	97.914.215.000	

1 2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3.600.000.000	
1 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	168 unit	5.628.532.821	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	168 unit	94.314.215.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	87%	892.518.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	87%	1.046.899.000	
1 4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	

1 5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	650.290.00 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	804.671.000	
1 6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	234.228.00 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lapora n	234.228.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD kondisi baik	87%	3.783.142. 240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD kondisi baik	87%	4.947.133.50 0	
1 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	1.308.236.3 40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	1.235.292.600	

1 8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	110.290.90 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	110.290.900	
1 9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	5 Unit	1.820.865.0 00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	5 Unit	3.057.800.000	
2 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	168 Unit	543.750.00 0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	168 Unit	543.750.000	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100%	34.425.389 .642	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100%	36.007.627.5 17	

21	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang. Bulan	33.920.389. 642	Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang. Bulan	35.347.377.51 7	
22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	380.000.00 0	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	535.250.000	
23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.00 0	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000	
9	Layanan Administrasi DPRD		Persentase fasilitasi aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100%	296.385.00 0	Layanan Administrasi DPRD		Persentase fasilitasi aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100%	1.741.299.80 0	
24	Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokum en		Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokum en	975.000.000	

25	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Dokumen	296.385.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Dokumen	766.299.800	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana	95%	51.675.823.800	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana	95%	89.443.384.000	
10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80%	2.175.860.800	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80%	1.226.648.000	
26	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	40.848.000	

27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	324.300.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	324.300.000	
28	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	780.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	716.500.000	
29	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	145.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	145.000.000	
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pengesahan APBD Tepat Waktu	95%	2.690.335.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pengesahan APBD Tepat Waktu	95%	1.334.650.000	
30	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	167.400.000	

3 1	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokum en	135.000.00 0	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokum en	157.000.000	
3 2	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokum en	2.000.000.0 00	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokum en	363.600.000	
3 3	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokum en	135.000.00 0	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokum en	363.200.000	
3 4	Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaba n APBD	1 Dokum en	275.335.00 0	Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaba n APBD	1 Dokum en	283.450.000	
1 2	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	275.000.00 0	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	549.250.000	

3 5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	20.250.000	
3 6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	529.000.000	
1 3	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	90%	23.713.120.000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	90%	25.319.886.000	
3 7	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			

38	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.937.970.000	
39	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	5.910.200.000	
40	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 orang	86.800.000	
41	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	50.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	336.000.000	
42	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	14.000.000.000	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	15.008.416.000	
43	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	40.500.000	

1 4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100%	2.137.450.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100%	2.137.450.000	
4 4	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50 Dokumen	138.900.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50 Dokumen	138.900.000	
4 5	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	
1 5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	127.450.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	63.500.000	
4 6	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	63.500.000	
1 6	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100%	20.556.608.000	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100%	58.812.000.000	

4 7	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokum en	20.556.608. 000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96 Dokum en	58.812.000.00 0	
Jumlah					106.946.0 05.705					239.569.086 .017	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri 90 Tahun 2019 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 15 Kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2025 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya. Tidak ada usulan lewat Musrenbang, karena kegiatan di Sekretariat Dewan (Setwan) tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan kegiatannya pelayanan terhadap anggota Dewan, sebagaimana tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisikan usulan Musrenbang Kabupaten Yang Di akomodir		NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merujuk pada suatu proses analisis atau penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah atau sedang diterapkan di tingkat nasional oleh suatu negara. Telaahan ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur juga harus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Maka, perlu dilakukan telaahan juga terhadap kebijakan provinsi yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Berikut tema dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dengan demikian, kebijakan nasional dan provinsi tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyusun rumusan arah dan tema prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintahan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Sekretariat DPRD sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Kabupaten Pasuruan bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025, maka arah kebijakan difokuskan pada :

1. Meningkatkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Meningkatkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka **Meningkatkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**, diprioritaskan pada Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah, yang akan dilakukan melalui :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.5. Fasilitas kunjungan tamu
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.3. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 7.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 8. Layanan Administrasi DPRD
 - 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - 8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Arah kebijakan dalam rangka **Meningkatkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**, diprioritaskan pada Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, yang akan dilakukan melalui :

- 33. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - 1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 34. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.3. Pembahasan APBD
 - 2.4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 35. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 3.2. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 36. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 4.1. Orientasi DPRD
 - 4.2. Pendalaman Tugas DPRD
 - 4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 4.7. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 37. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 5.2. Pelaksanaan Reses
- 38. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 6.1. Penyusunan Kode Etik DPRD
- 39. Fasilitasi Tugas DPRD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Pasuruan demi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 menetapkan tujuan memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya yaitu “Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD “. Sedangkan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatkan kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah, Meningkatkan Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

Tabel 3.2 A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026				
...				
SPM	(jika ada)			
Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	(jika ada) - sesuaikan Renstra			
Tujuan: Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD yang Berkualitas	IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD	89,95%		
Sasaran: Meningkatnya fasilitas terhadap aspirasi masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi	83		
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	76,45		
Tujuan : Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD		78%	82%
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi		92%	93%
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		76,99	77,12

Tabel 3.2 B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,07%	Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
--	--	--	--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2. Penyediaan adminsitrase pelaksanaan tugas ASN 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.5. Fasilitas kunjungan tamu 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.3. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 7.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.2. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 8. Layanan Administrasi DPRD 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 8.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.2. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 1.3. Penyusunan Tata Tertib DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
		2.3 Pembahasan APBD 2.4 Pembahasan APBD Perubahan 2.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.1 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3.2 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 4.1 Orientasi DPRD 4.2 Pendalaman Tugas DPRD 4.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 4.6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 5.2 Pelaksanaan Reses 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD 7. Fasilitasi Tugas DPRD 7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
Pemanfaatan Aplikasi Converter Audio to Text dalam pembuatan Risalah Rapat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp5.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan sasaran memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program Penunjang urusan Pemerintah terdiri dari: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terbagi dalam 2 kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 kegiatan, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terbagi dalam 2 kegiatan, Layanan Administrasi DPRD 1 kegiatan, Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah terbagi dalam 4 kegiatan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terbagi dalam 4 kegiatan, Administrasi Umum Perangkat Daerah terbagi dalam 5 kegiatan, serta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terbagi dalam 2 kegiatan. Sedangkan Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari: Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD 1 kegiatan, Peningkatan Kapasitas DPRD terbagi 2 kegiatan, Pembahasan Kebijakan Anggaran terbagi 2 kegiatan, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1 kegiatan, serta Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		95%	55.270.181.905			95%	150.125.702.017
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		90%	95.000.000			90%	95.000.000
4.02.01.02.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekwa n	4 Dokumen	Belanj a operas i : Rp 55.000.000	DAU		4 Dokumen	55.000.000
						Belanj a pegawai : Rp -				
						Belanj a barang dan jasa : Rp 55.000.000				
						Belanj : Rp				

4.02.01.02.01.007					a bunga	-				
					Belanja subsidi	Rp -				
					Belanja hibah	Rp -				
					Belanja bantuan sosial	Rp -				
					Belanja modal	Rp -				
					Belanja tidak terduga	Rp -				
					Belanja transfer	Rp -				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekwa n	2 Laporan	Belanja operasi : Rp 40.000.000	DAU		2 Laporan	40.000.000
						Belanja pegawai	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	Rp 40.000.000			
						Belanja bunga	Rp -			
						Belanja subsidi	Rp -			
						Belanja hibah	Rp -			

						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
	...											
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%			Rp 5.896.664.002			100%	6.149.954.000
4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwa n	392/tahun	Belanja operasi	:	Rp 3.999.114.002	DAU		420/tahun	4.151.760.000
						Belanja pegawai	:	Rp 3.999.114.002				4.151.760.000
						Belanja barang dan jasa	:	Rp -				-
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				

4.02.01.2.02.00 02					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekwa n	12 Dokumen	Belanja operasi : Rp 1.753.550.000	DAU	12 Dokumen	1.753.550.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 1.753.550.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				

4.02.01.2.02.00
03

					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tunjangan ASN	12 Dokumen	Belanja operasi : Rp 144.000.000	DAU		12 Dokumen	244.644.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 144.000.000				244.644.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				

						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
	...											
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan		100%			Rp 400.000.000			100%	400.000.000
4.02.01.2.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekwa n	2 Dokumen	Belanja operasi	:	Rp 400.000.000	DAU		2 Dokumen	400.000.000
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 400.000.000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				

						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
	...											
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		85%			Rp 3.302.550.200			85%	Rp 1.823.573.200
4.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekwa n	12 Paket	Belanja operasi	:	Rp 125.800.000	DAU		12 Paket	125.800.000
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 125.800.000				125.800.000
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja	:	Rp -				

4.02.01.2.06.00 04					modal				
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja transfer	: Rp -			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sekwaan	12 Paket	Belanja operasi : Rp 1.950.650.200	DAU	12 Paket	479.173.200
					Belanja pegawai	: Rp -			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 1.950.650.200			479.173.200
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					Belanja modal	: Rp -			
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja	: Rp -			

4.02.01.2.06.00
05

					<i>transf er</i>				
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Sekwa n</i>	<i>12 Paket</i>	<i>Belanj a operas i</i> : <i>Rp 245.600.000</i>	<i>DAU</i>		<i>12 Paket</i>	<i>245.600.000</i>
					<i>Belanj a pegaw ai</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a barang dan jasa</i> : <i>Rp 245.600.000</i>				<i>245.600.000</i>
					<i>Belanj a bunga</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a subsidi</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a hibah</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a bantua n sosial</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a modal</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a tidak terduga</i> : <i>Rp -</i>				
					<i>Belanj a transf er</i> : <i>Rp -</i>				

4.02.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekwa n	12 Dokumen	Belanja : Rp 265.000.000 operasi	DAU		12 Dokumen	280.000.000
						Belanja : Rp - pegawai				
						Belanja : Rp 265.000.000 barang dan jasa				280.000.000
						Belanja : Rp - bunga				
						Belanja : Rp - subsidi				
						Belanja : Rp - hibah				
						Belanja : Rp - bantuan sosial				
						Belanja : Rp - modal				
						Belanja : Rp - tidak terduga				
						Belanja : Rp - transfer				
4.02.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekwa n	12 Laporan	Belanja : Rp 715.500.000 operasi	DAU		12 Laporan	693.000.000
						Belanja : Rp - pegawai				

					ai				
					Belanj : Rp a 715.500.000 barang dan jasa				693.000.000
					Belanj : Rp a - bunga				
					Belanj : Rp a - subsidi				
					Belanj : Rp a - hibah				
					Belanj : Rp a - bantuan sosial				
					Belanj : Rp a - modal				
					Belanj : Rp a - tidak terduga				
					Belanj : Rp a - transfer				
	...								
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		90%	Rp 6.178.532.821		90%	Rp 97.914.215.000
4.02.01.2.07.00 11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekwa n	1 unit	Belanj : Rp a 550.000.000 operasi	DAU	4 unit	3.600.000.000
					Belanj : Rp a - pegawai				

4.02.01.2.07.00
11

					ai				
					Belanja : Rp a 550.000.000 barang dan jasa				3.600.000.000
					Belanja : Rp a - bunga				
					Belanja : Rp a - subsidi				
					Belanja : Rp a - hibah				
					Belanja : Rp a - bantuan sosial				
					Belanja : Rp a - modal				
					Belanja : Rp a - tidak terduga				
					Belanja : Rp a - transfer				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekwa n	168 unit	Belanja : Rp a 5.628.532.821 operasi	DAU		168 unit	94.314.215.000
					Belanja : Rp a - pegawai				
					Belanja : Rp a 5.628.532.821 barang			169	94.314.215.000

						dan jasa				
						Belanj a bunga	: Rp -			
						Belanj a subsidi	: Rp -			
						Belanj a hibah	: Rp -			
						Belanj a bantuan sosial	: Rp -			
						Belanj a modal	: Rp -			
						Belanj a tidak terduga	: Rp -			
						Belanj a transfer	: Rp -			
	...									
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia		87%	Rp 892.518.000			87%	Rp 1.046.899.000
4.02.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekwa n	6 Laporan	Belanj a operasi	: Rp 8.000.000	DAU	12 Laporan	8.000.000
						Belanj a pegawai	: Rp -			
						Belanj a barang dan jasa	: Rp 8.000.000			8.000.000

4.02.01.2.08.00 02					Belanja bunga	: -	Rp				
					Belanja subsidi	: -	Rp				
					Belanja hibah	: -	Rp				
					Belanja bantuan sosial	: -	Rp				
					Belanja modal	: -	Rp				
					Belanja tidak terduga	: -	Rp				
					Belanja transfer	: -	Rp				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekwa n	12 Laporan	Belanja operasi	: 650.290.000	Rp	DAU	12 Laporan	804.671.000
					Belanja pegawai	: -	Rp				
					Belanja barang dan jasa	: 650.290.000	Rp				804.671.000
					Belanja bunga	: -	Rp				
					Belanja subsidi	: -	Rp				

4.02.01.2.07.00 11					Belanja : Rp hibah -				
					Belanja : Rp bantuan - sosial				
					Belanja : Rp modal -				
					Belanja : Rp tidak - terduga				
					Belanja : Rp transf - er				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekwa n	12 Laporan	Belanja : Rp operas 234.228.000 i	DAU	2 Laporan	234.228.000
					Belanja : Rp pegawai -				
					Belanja : Rp barang 234.228.000 dan jasa				234.228.000
					Belanja : Rp bunga -				
					Belanja : Rp subsidi -				
					Belanja : Rp hibah -				
					Belanja : Rp bantuan -				

						sosial				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	...									
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik		87%	Rp 3.783.142.240			87%	Rp 4.947.133.500
4.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekwa n	24 Unit	Belanja operasi : Rp 1.308.236.340	DAU		24 Unit	Rp 1.235.292.600
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 1.308.236.340				1.235.292.600
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				

4.02.01.2.09.00 02					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekwa n	24 Unit	Belanja operasi : Rp 110.290.900	DAU	24 Unit	Rp 110.290.900
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 110.290.900				110.290.900
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				

4.02.01.2.09.00					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga				
					Belanja transfer				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekwa n	5 Unit	Belanja operasi : Rp 1.820.865.000	DAU	5 Unit	Rp 3.057.800.000
					Belanja pegawai				
					Belanja barang dan jasa	Rp 1.820.865.000			3.057.800.000
					Belanja bunga	Rp -			
					Belanja subsidi	Rp -			
					Belanja hibah	Rp -			
					Belanja bantuan sosial	Rp -			
					Belanja modal	Rp -			
					Belanja tidak terduga	Rp -			

4.02.01.2.09.00 11					<i>a</i>				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Sekwa n</i>	<i>168 Unit</i>	<i>Belanja operasi</i> : Rp 543.750.000	<i>DAU</i>	<i>168 Unit</i>	<i>Rp 543.750.000</i>
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 543.750.000				<i>543.750.000</i>
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja</i> : Rp -				

						transf er				
	...									
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya operasional anggota DPRD dengan baik	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi		100%	Rp 34.425.389.642			100%	Rp 36.007.627.517
4.02.01.2.15.00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekwa n	50 Orang/bul an	Belanj a operas i : Rp 33.920.389.642	DAU		50 Orang/bul an	Rp 35.347.377.517
						Belanj a pegaw ai : Rp 33.920.389.642				35.347.377.517
						Belanj a barang dan jasa : Rp -				
						Belanj a bunga : Rp -				
						Belanj a subsidi : Rp -				
						Belanj a hibah : Rp -				
						Belanj a bantua n sosial : Rp -				
						Belanj a modal : Rp -				
						Belanj a tidak terdug a : Rp -				
						Belanj a transf er : Rp -				

4.02.01.2.15.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekwa n	150 Paket	Belanj a operas i : Rp 380.000.000	DAU		150 Paket	Rp 535.250.000
						Belanj a pegaw ai : Rp -				
						Belanj a barang dan jasa : Rp 380.000.000				535.250.000
						Belanj a bunga : Rp -				
						Belanj a subsidi : Rp -				
						Belanj a hibah : Rp -				
						Belanj a bantua n sosial : Rp -				
						Belanj a modal : Rp -				
						Belanj a tidak terduga : Rp -				
						Belanj a transf er : Rp -				
4.02.01.2.15.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sekwa n	50 Orang	Belanj a operas i : Rp 125.000.000	DAU		50 Orang	Rp 125.000.000
						Belanj a pegaw ai : Rp -				

						Belanja barang dan jasa	: Rp 125.000.000				125.000.000
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
	...										
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya fasilitas aktifitas anggota DPRD	Persentase fasilitas aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi		100%		Rp 296.385.000			100%	Rp 1.741.299.800
4.02.01.2.16.00 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekwa n	2 Dokumen	Belanja operasi	: Rp -	DAU		3 Dokumen	Rp 975.000.000
						Belanja pegawai	: Rp -				

4.02.01.2.15.00
03

					Belanja barang dan jasa : Rp -				975.000.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekwa n	2 Dokumen	Belanja operasi : Rp 296.385.000	DAU		16 Dokumen	Rp 766.299.800
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 296.385.000				766.299.800
					Belanja bunga : Rp -				

						Belanj a subsidi	:	Rp -				
						Belanj a hibah	:	Rp -				
						Belanj a bantua n sosial	:	Rp -				
						Belanj a modal	:	Rp -				
						Belanj a tidak terdug a	:	Rp -				
						Belanj a transf er	:	Rp -				
	...							-				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana		95%			51.675.823.80 0			95%	89.443.384.00 0
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda		80%			2.175.860.800			80%	1.226.648.000
4.02.02.2.01.00 01	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Sekwa n</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>Belanj a operas i</i>	:	<i>Rp 926.560.800</i>	<i>DAU</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>40.848.000</i>
						Belanj	:	Rp				

4.02.02.2.01.00 02					a pegaw ai	-				
					Belanj a barang dan jasa	Rp 926.560.800				40.848.000
					Belanj a bunga	Rp -				
					Belanj a subsidi	Rp -				
					Belanj a hibah	Rp -				
					Belanj a bantua n sosial	Rp -				
					Belanj a modal	Rp -				
					Belanj a tidak terduga	Rp -				
					Belanj a transf er	Rp -				
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekwa n	12 Dokumen	Belanj a operas i	Rp 324.300.000	DAU	8 Dokumen	324.300.000
					Belanj a pegaw ai	Rp -				
					Belanj a barang dan jasa	Rp 324.300.000				324.300.000

4.02.02.2.01.00 04					Belanja bunga	:	Rp -				
					Belanja subsidi	:	Rp -				
					Belanja hibah	:	Rp -				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
					Belanja modal	:	Rp -				
					Belanja tidak terduga	:	Rp -				
					Belanja transfer	:	Rp -				
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sekwa n	12 Dokumen	Belanja operasi	:	Rp 780.000.000	DAU	8 Dokumen	716.500.000
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 780.000.000			716.500.000
						Belanja bunga	:	Rp -			

4.02.02.2.01.00 05					Belanja subsidi	Rp -				
					Belanja hibah	Rp -				
					Belanja bantuan sosial	Rp -				
					Belanja modal	Rp -				
					Belanja tidak terduga	Rp -				
					Belanja transfer	Rp -				
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sekwa n	1 Dokumen	Belanja operasi : Rp 145.000.000	DAU		1 Dokumen	145.000.000
						Belanja pegawai	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	Rp 145.000.000			145.000.000
						Belanja bunga	Rp -			
						Belanja subsidi	Rp -			
						Belanja hibah	Rp -			
						Belanja bantuan	Rp -			

						sosial				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	...									
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal	Pengesahan APBD Tepat Waktu		95%	2.690.335.000			95%	1.334.650.000
4.02.02.2.02.00 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekwa n	1 Dokumen	Belanja operasi : Rp 145.000.000	DAU		1 Dokumen	167.400.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 145.000.000				167.400.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja : Rp -				

4.02.02.2.02.00 02					bantuan sosial				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekwa n	1 Dokumen	Belanja operasi : Rp 135.000.000	DAU	1 Dokumen	157.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 135.000.000				157.000.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				

4.02.02.2.02.00 03					Belanja tidak terduga	:	Rp -				
					Belanja transfer	:	Rp -				
	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekwa n	1 Dokumen	Belanja operasi	:	Rp 2.000.000.000	DAU	1 Dokumen	363.600.000
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 2.000.000.000			363.600.000
						Belanja bunga	:	Rp -			
						Belanja subsidi	:	Rp -			
						Belanja hibah	:	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
						Belanja modal	:	Rp -			
						Belanja tidak terduga	:	Rp -			
						Belanja transfer	:	Rp -			

4.02.02.2.02.00 04	Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunnya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a operas i : Rp 135.000.000	DAU		1 Dokumen	363.200.000
						Belanj a pegaw ai : Rp -				
						Belanj a barang dan jasa : Rp 135.000.000				363.200.000
						Belanj a bunga : Rp -				
						Belanj a subsidi : Rp -				
						Belanj a hibah : Rp -				
						Belanj a bantua n sosial : Rp -				
						Belanj a modal : Rp -				
						Belanj a tidak terduga : Rp -				
						Belanj a transf er : Rp -				
4.02.02.2.01.00 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a operas i : Rp 275.335.000	DAU		1 Dokumen	283.450.000
						Belanj a pegaw ai : Rp -				

						Belanja : Rp a 275.335.000 barang dan jasa				283.450.000
						Belanja : Rp a - bunga				
						Belanja : Rp a - subsidi				
						Belanja : Rp a - hibah				
						Belanja : Rp a - bantua n sosial				
						Belanja : Rp a - modal				
						Belanja : Rp a - tidak terduga				
						Belanja : Rp a - transf er				
	...									
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	275.000.000			100%	549.250.000

4.02.02.2.03.00 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a operas i	:	Rp 140.000.000	DAU		1 Dokumen	20.250.000
						Belanj a pegaw ai	:	Rp -				
						Belanj a barang dan jasa	:	Rp 140.000.000				20.250.000
						Belanj a bunga	:	Rp -				
						Belanj a subsidi	:	Rp -				
						Belanj a hibah	:	Rp -				
						Belanj a bantua n sosial	:	Rp -				
						Belanj a modal	:	Rp -				
						Belanj a tidak terdug a	:	Rp -				
						Belanj a transf er	:	Rp -				

4.02.02.2.03.00 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a : Rp 135.000.000	DAU		1 Dokumen	529.000.000
						Belanj a pegawai : Rp -				
						Belanj a barang dan jasa : Rp 135.000.000				529.000.000
						Belanj a bunga : Rp -				
						Belanj a subsidi : Rp -				
						Belanj a hibah : Rp -				
						Belanj a bantuan sosial : Rp -				
						Belanj a modal : Rp -				
						Belanj a tidak terduga : Rp -				
						Belanj a transfer : Rp -				
		...								

4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas		95%	23.713.120.000			95%	25.319.886.000
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a operas i : Rp 750.000.000	DAU		1 Dokumen	-
						Belanj a pegaw ai : Rp -				
						Belanj a barang dan jasa : Rp 750.000.000				
						Belanj a bunga : Rp -				
						Belanj a subsidi : Rp -				
						Belanj a hibah : Rp -				
						Belanj a bantua n sosial : Rp -				
						Belanj a modal : Rp -				
						Belanj a tidak terduga : Rp -				
						Belanj a transfe r : Rp -				

4.02.02.2.04.00 02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekwa n	4 Dokumen	Belanja : Rp operasi 4.668.120.000	DAU		6 Dokumen	3.937.970.000
						Belanja : Rp pegawai -				
						Belanja : Rp barang 4.668.120.000 dan jasa				3.937.970.000
						Belanja : Rp bunga -				
						Belanja : Rp subsidi -				
						Belanja : Rp hibah -				
						Belanja : Rp bantuan sosial -				
						Belanja : Rp modal -				
						Belanja : Rp tidak terduga -				
						Belanja : Rp transfer -				
4.02.02.2.04.00 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekwa n	8 Orang	Belanja : Rp operasi 120.000.000	DAU		7 Orang	Rp 86.800.000
						Belanja : Rp pegawai -				

4.02.02.2.04.00 05					Belanja barang dan jasa : Rp 120.000.000				86.800.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekwaan	7 Orang	Belanja operasi : Rp 50.000.000	DAU	7 Orang	336.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 50.000.000				336.000.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja : Rp -				

4.02.02.2.04.00 06					subsid				
					Belanj a hibah	: Rp -			
					Belanj a bantuan sosial	: Rp -			
					Belanj a modal	: Rp -			
					Belanj a tidak terduga	: Rp -			
					Belanj a transfer	: Rp -			
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekwa n	12 Dokumen	Belanj a operas i	: Rp 14.000.000.000	DAU	15 Dokumen 15.008.416.000
						Belanj a pegawai	: Rp -		
						Belanj a barang dan jasa	: Rp 14.000.000.000		15.008.416.000
						Belanj a bunga	: Rp -		
						Belanj a subsid	: Rp -		
						Belanj a hibah	: Rp -		
						Belanj a bantuan	: Rp -		

4.02.02.2.04.00 07					n sosial				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sekwa n	1 Dokumen	Belanja operasi : Rp 125.000.000	DAU	1 Dokumen	40.500.000
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 125.000.000				40.500.000
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				

4.02.02.2.04.00 08					a				
					Belanja : Rp a transfer -				
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekwa n	12 Dokumen	Belanja : Rp a operasi 4.000.000.000	DAU	12 Dokumen	5.910.200.000
					Belanja : Rp a pegawai -				
					Belanja : Rp a barang dan jasa 4.000.000.000				5.910.200.000
					Belanja : Rp a bunga -				
					Belanja : Rp a subsidi -				
					Belanja : Rp a hibah -				
					Belanja : Rp a bantuan sosial -				
					Belanja : Rp a modal -				
					Belanja : Rp a tidak terduga -				
					Belanja : Rp a transf -				

						er				
	...									
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD		100%	2.137.450.000			100%	2.137.450.000
4.02.02.2.05.00 01	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sekwa n	50 Dokumen	Belanj : Rp a 138.900.000 operas i	DAU		50 Dokumen	138.900.000
						Belanj : Rp a - pegaw ai				
						Belanj : Rp a 138.900.000 barang dan jasa				138.900.000
						Belanj : Rp a - bunga				
						Belanj : Rp a - subsidi				
						Belanj : Rp a - hibah				
						Belanj : Rp a - bantua n sosial				
						Belanj : Rp a - modal				
						Belanj : Rp a - tidak terdug a				
						Belanj : Rp a - transf er				

4.02.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekwa n	3 Dokumen	Belanja : Rp operasi 1.998.550.000	DAU		3 Dokumen	1.998.550.000
						Belanja : Rp pegawai -				
						Belanja : Rp barang dan jasa 1.998.550.000				1.998.550.000
						Belanja : Rp bunga -				
						Belanja : Rp subsidi -				
						Belanja : Rp hibah -				
						Belanja : Rp bantuan sosial -				
						Belanja : Rp modal -				
						Belanja : Rp tidak terduga -				
						Belanja : Rp transfer -				
	...									
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		100%	127.450.000			100%	63.500.000

4.02.02.2.06.00 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sekwa n	1 Dokumen	Belanj a operas i	:	Rp 127.450.000	DAU		1 Dokumen	63.500.000
						Belanj a pegaw ai	:	Rp -				
						Belanj a barang dan jasa	:	Rp 127.450.000				63.500.000
						Belanj a bunga	:	Rp -				
						Belanj a subsidi	:	Rp -				
						Belanj a hibah	:	Rp -				
						Belanj a bantua n sosial	:	Rp -				
						Belanj a modal	:	Rp -				
						Belanj a tidak terdug a	:	Rp -				
						Belanj a transf er	:	Rp -				
	...											
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi		100%			20.556.608.00 0			100%	58.812.000.00 0

4.02.02.2.08.00 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekwa n	12 Dokumen	Belanja operasi : Rp 20.556.608.000	DAU		12 Dokumen	58.812.000.000
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 20.556.608.000				58.812.000.000
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
						Total Belanja a PD : Rp 106.946.005.705				Rp 239.569.086.017

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun Dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.. Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka penengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2025.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh staf/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan secara triwulanan.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupten Pasuruan Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640828 198802 1 001